

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah kondisi ketidakmampuan yang dialami individu, kelompok, dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan standar hidup minimum. Indonesia merupakan salah satu dari beberapa yang termasuk Negara berkembang. Permasalahan yang dihadapi oleh Negara berkembang salah satunya yakni, pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat tetapi tidak diimbangi dengan pertumbuhan pembangunan ekonomi. Ketidak seimbangan tersebut akan menjadi ketimpangan pada masalah ketenagakerjaan. Dimana tingkat pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan maka akan menimbulkan berbagai permasalahan yang harus ditanggung oleh masyarakat, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan banyaknya pengangguran. Masalah ketenagakerjaan salah satunya yakni pengangguran yang tinggi. Indonesia sebagai Negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan penduduk cepat tetapi

pertumbuhan ekonomi relatif lebih lambat, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah salah satunya adalah kemiskinan.¹

Gambar 1.1
Data Kemiskinan Di Indonesia



Sumber data: Badan Pusat Statistik Indonesia

Pada grafik diatas ditunjukkan data kemiskinan delapan tahun terakhir yang mana mengalami naik turun. Pada tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia megalami peningkatan sebesar 0,97 persen di bulan september yakni berjumlah 2,76 juta jiwa hal ini disebabkan karena adanya pandemi covid 19 yang melanda Indonesia. ²

¹ Sadono Sukino, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar kebijakan* (Jakarta: Kencana, 2010), 15.

² www.bps.co.id Profil Kemiskinan di Indonesia Sep 2020

Demikian pula yang terjadi di kabupaten Nganjuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah warga miskin hingga tahun 2020 mencapai 122.730.³

Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab terhadap kemiskinan karena hal ini merupakan amanah konstitusi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”⁴

Pandangan Islam terkait kemiskinan bukanlah semata-mata tentang ketidakmampuan untuk mencukupi keperluan hidupnya, akan tetapi kemiskinan merupakan masalah gaya hidup yang dilakukan individu itu sendiri, dimana ia menjadi miskin disebabkan oleh sifat buruk yang ia miliki seperti enggan untuk bekerja dan berihktiar. Islam sendiri sangat membenci Muslim yang suka bermalas-malasan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Insyirah ayat 7:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Artinya: "Dan jika telah selesai satu pekerjaan maka segeralah mengerjakan pekerjaan lain." (QS. Al-insyirah (94):7).⁵

Kesejahteraan hidup merupakan dambaan setiap individu, masyarakat yang sejahtera tidak akan terwujud apabila para masyarakatnya hidup dalam keadaan miskin. Oleh karena itu kemiskinan harus dihapuskan karena merupakan suatu

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Nganjuk, *Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) 2019-2020*.

⁴ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 2015), 2-3.

⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2005), 597.

bentuk ketidaksejahteraan yang menggambarkan suatu kondisi yang serba kurang dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.⁶

Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah dalam wujud program-program seperti bantuan langsung tunai (BLT), jaminan kesehatan masyarakat, Beras miskin, program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan program Kredit Usaha Rakyat (KUR).⁷ Dengan program diatas ternyata apemerintahan masih belum bisa menghilangkan kemiskinan seluruhnya.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara kesejahteraan rakyat. Bentuk tanggung jawab tersebut tercermin dengan digulirkan berbagai program sebagai jaminan sosial guna memutus rantai kemiskinan.

Pemerintahan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan yakni dengan meningkatkan program penanggulangan kemiskinan yakni salah satunya adalah Program Keluarga Harapan yang mulai diperkenalkan pada tahun 2007 yang merupakan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Program ini dijalankan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan sosial rumah tangga miskin.⁸

⁶ Yusuf Qardawi, *Kita Islam Mengentaskan Kemiskinan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

⁷ Yeni Salma Barlinti, "Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan," *Lex Jurnalica* 4, no. 3 (2007), <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/267>.

⁸ Kementerian Sosial RI, *Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2019* (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2019).

Adapun beberapa keluarga penerima bantuan ini bisa meningkat taraf kesejahteraan rumah tangganya berkat adanya bantuan program keluarga harapan ini.

Tabel 2.1

Data Perubahan Perekonomian Sebelum dan Sesudah Menerima Bantuan Sosial PKH

No	Nama	Sebelum menerima bantuan sosial PKH	Setelah menerima bantuan sosial PKH
1	Darotin	Memiliki toko kelontong kecil	Perkebunan, Emas, Toko Kelontong yang sudah lengkap
2	Sopiatun	Buruh tani dan Pelihara Sapi milik orang	Sapi milik sendiri dan Perkebunan
3	Lasiati	Pelihari sapi milik orang	Sapi milik sendiri dan Perkebunan
4	Winarti	Buruh tani dan Pelihara sapi milik orang	Sapi milik sendiri dan Sawah (Warisan)
5	Sukatemi	Buruh tani	Sawah (Warisan)
6	Ismiati	Buruh tani	Perkebunan
7	Khomsatun	Pelihara sapi milik orang lain	Sapi milik sendiri dan Perkebunan
8	Yunanik	Buruh tani	Perkebunan
9	Ika Nur Hidayah	Suami kerja serabutan	Merasa lebih cukup dibanding yang lain (Mendapatkan warisan)
10	Nur Hamimah	Buruh tani, Suami menganggur	Merasa lebih cukup dibanding yang lain (Suami bekerja)

Sumber: Data Graduasi KPM PKH Kab. Nganjuk

Pada tabel diatas menunjukkan peningkatan kesejahteraan peserta PKH sebelum dan sesudah menerima bantuan sosial PKH. Kesejahteraan keluarga mereka dapat dilihat dari data diatas dimana ada KPM yang sebelumnya hanya memiliki toko kelontong kecil-kecilan hingga mampu memperbesar tokonya dengan bantuan PKH tersebut.

Agama Islam sendiri dalam hal menangani masalah kemiskinan memberi solusi melalui zakat dan infaq, karena kekayaan yang manusia miliki ada hak orang lain didalamnya, sehingga berhak untuk memberikan sebagian dari apa yang dimiliki kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam Qur'an surat Adz-Dzariyat ayat 19:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian". (QS. Adz-Dzariyat (51): 19)⁹

Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang sangat penting. Cakupannya juga sangat luas, bagi suatu perusahaan kegiatan distribusi merupakan ujung tombak keberhasilan suatu usaha. Bahkan, kegiatan distribusi yang dilakukan suatu negara juga menentukan kesejahteraan masyarakatnya.¹⁰

Pada tahun 2013 pertama kali PKH muncul di Kecamatan Ngetos. Ngetos terbagi menjadi Sembilan desa. Tingkat kemiskinan di Ngetos ini termasuk cukup

⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali* (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2005), 522.

¹⁰ Westriningsih, *Kegiatan Distribusi* (Klaten: Cempaka Putih, 2018), iii.

tinggi sehingga dengan adanya PKH ini bisa menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan di Kecamatan Ngetos.

Tabel 2.2

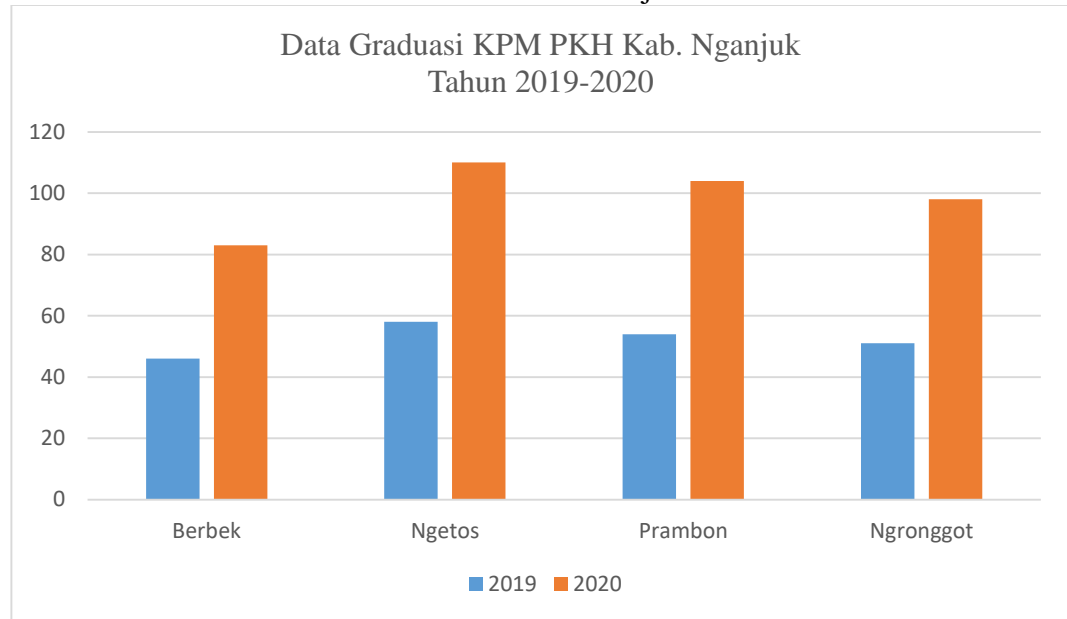
Data penerima PKH di Kec. Ngetos

No	Tahun	Penerima
1	2014	1087
2	2015	1001
3	2016	998
4	2017	2003
5	2018	1921
6	2019	2966
7	2020	2821
	Total	12.797

Sumber data: Rekapitulasi jumlah penerima bansos PKH Kecamatan Ngetos

Data diatas menunjukkan banyaknya warga kecamatan Ngetos yang kesejahteraan keluarganya kurang yang menerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH).

Tabel 2.3
KPM Graduasi Mandiri Sejahtera



Sumber Data: BNBA KPM Graduasi Mandiri Sejahtera, Bulan Januari-November 2019 dan rekapitulasi capaian Graduasi KPM PKH tahun 2020, Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Nganjuk.

Tabel diatas merupakan data jumlah graduasi keluarga penerima manfaat (KPM) di tahun 2019-2020, dimana Desa Ngetos merupakan Desa penyumbang graduasi tertinggi dibanding Desa-desa yang lain.

Garduasi Mandiri Sejahtera yakni berhasilnya KPM dalam melepaskan diri dari bantuan sosial PKH dengan upaya KPM seperti berusaha sesuai kemampuannya, semisal berwirausaha, berdagang maupun membuat keterampilan. Pada peserta graduasi ini tidak ada pengkategorian penerima, jika dilihat sudah mampu atau sudah tidak ada komponen lagi dalam satu keluarga maka KPM tersebut sudah dinyatakan lulus dari bansos PKH. Bahkan dari pihak pemerintahan

Kabupaten Nganjuk akan memberikan penghargaan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH yang merasa tidak layak menerima bantuan atau dikatakan keluarga mampu mau mengundurkan diri dari bantuan sosial ini, penghargaan ini merupakan sebuah apresiasi bagi KPM tersebut.

Tabel 2.4

Data KPM Graduasi PKH Desa Kepel

No	Nama	Masuk	Keluar
1	Surati	2013	2019
2	Kotimah	2013	2019
3	Wiwik Fitriani	2013	2019
4	Darotin	2013	2019
5	Marsini	2013	2019
6	Winarti	2013	2019
7	Jumiatun	2016	2019
8	Setianik	2016	2019
9	Ismiati	2016	2019
10	Patemi	2016	2019
11	Khomsatun	2016	2019
12	Darti	2016	2019
13	Sudarsih	2018	2019
14	Umi Nahariyah	2018	2019
15	Samrotul Muallimah	2018	2019
16	Hartatik	2018	2019

Sumber Data: BNBA KPM Graduasi Mandiri Sejahtera, Bulan Januari-November 2019

Berdasarkan tabel 2.4 diketahui bebarapa kategori KPM yang pada periode-periode tertentu mampu mandiri sejahtera dari bantuan bansos PKH yakni ada beberapa KPM yang mana dalam kurun waktu enam tahun baru bisa mandiri

sejahtera, dan ada juga yang dalam kurun waktu tiga tahun bisa mandiri sejahtera, bahkan ada juga dalam kurun waktu satu tahun sudah bisa mandiri sejahtera dari bantuan PKH.

Efektivitas merupakan hubungan antara hasil akhir dengan tujuan, semakin besar kontribusi hasil akhir terhadap tercapainya tujuan maka semakin efektif program, organisasi atau kegiatan tersebut.¹¹ Sebagai program bansos PKH haruslah memfokuskan tercapainya tujuan dari program tersebut, sehingga perlu diawasi sungguh-sungguh.

Dalam praktek ekonomi, konsep *falah* (kebahagiaan) merujuk pada kesejahteraan materiil semua warga negara. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi dan kebaikan masyarakat melalui distribusi sumber-sumber materiil yang merata dan melalui penegakan keadilan sosial.¹²

Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dalam pendistribusian harta, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun individu.¹³

Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan khususnya dalam distribusi kekayaan sangat totalitas. Kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada manusia itu tidak boleh hanya mengalir pada kalangan kaya saja, akan tetapi harus

¹¹ Mahmudi, *Manajemen Kerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005).

¹² Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 32.

¹³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

juga mengalir pada kalangan yang mengalami keterbatasan ekonomi.¹⁴ Dalam sistem ekonomi Islam pendistribusian kekayaan dan pendapatan harus berlangsung secara adil dan merata. Al-Qur'an menyatakan:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” (Qs. Al-Hasyr (59):7)¹⁵

Dasar karakteristik pendistribusian adalah adil dan jujur, karena dalam Islam sekecil apapun perbuatan yang dilakukan, semua akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Pelaksanaan distribusi bertujuan untuk saling memberi manfaat dan menguntungkan satu sama lain. Secara umum, Islam mengarahkan mekanisme, muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila terjadi ketidakseimbangan distribusi, maka hal ini akan memicu timbulnya konflik individu maupun sosial. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk mengakhiri kesengsaraan di muka bumi ini adalah dengan menerapkan keadilan ekonomi.

¹⁴ Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), 29.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahnya Al-Jumanatul 'Ali*, (Bandung: CV Penerbit J-ART: 2005), 547.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin Ditinjau dari Distribusi Islam (Studi kasus di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk” karena program ini merupakan bantuan dari pemerintah untuk masyarakat miskin, sehingga perlu dikaji lebih dalam mengenai dampak yang dirasakan oleh penerima bantuan ini.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin di Desa Kepel Kec. Ngetos Kab. Nganjuk?
2. Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin di Desa Kepel Kec. Ngetos Kab. Nganjuk Ditinjau dari Distribusi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan fokus masalah penelitian di atas, ada beberapa tujuan dari penelitian yaitu:

1. Menjelaskan Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin di Desa Kepel Kec. Ngetos Kab. Nganjuk.

2. Menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin di Desa Kepel Kec. Ngetos kab. Nganjuk ditinjau dari Distribusi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti memiliki kegunaan. Kegunaan tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Manfaat dari segi teoritis diharapkan dari penelitian ini bisa menambah wawasan keilmuan terkait Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin ditinjau dari Distribusi Islam. Hal ini menjadi penting guna memperkaya khasanah penelitian yang bersinggungan dengan efektivitas program keluarga harapan (PKH).

2. Kegunaan secara praktis

Kegunaan secara praktis yakni hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan kepada Dinas Sosial dan PPPA Kabupaten Nganjuk dalam menganalisis kebijakan yang diterapkan tentang Program Keluarga Harapan pada peningkatan kemakmuran masyarakat Kabupaten Nganjuk.

E. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan terkait penulisan skripsi ini, antarlain:

1. Penelitian berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar”.¹⁶ Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PKH di bidang pendidikan sudah berjalan dengan baik meskipun masih ada beberapa kekurangan, ditunjukkan dengan pendamping secara rutin mengadakan pertemuan anggota serta ketepatan pemberian bantuan kepada peserta. Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian yang akan dilakukan mengenai efektivitas pelaksanaan PKH dalam mensejahterakan rakyat miskin.
2. Penelitian berjudul “Peranan Dana Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)”¹⁷. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan menghasilkan: Peranan PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri memiliki peran, namun peran PKH belum maksimal. Dana tersebut hanya membantu penerima dalam meningkatkan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Namun dengan adanya PKH, penerima merasa adanya peningkatan

¹⁶Nurfahira Syamir, “Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan di Kecamatan Tamalate Kota Makasar” (*Skripsi* Program Studi Administrasi Negara Universitas Hasanudi, 2014)

¹⁷ Rizcha Rif'atu Ni'mah, “Peranan Dana Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Banjarejo Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri)” (*Skripsi* Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Kediri, 2017)

kesejahteraan karena mampu mencukupi kebutuhan yang lain. Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan Rizcha Rif'atu Ni'mah, yang meneliti mengenai peranan dana bantuan PKH dalam mensejahterakan masyarakat Desa Banjarejo Kec. Ngadiluwih Kab. Nganjuk. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti berisi tentang efektivitas pelaksanaan PKH dalam mensejahterakan rakyat miskin di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk.

3. Penelitian dengan judul "Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mensejahterakan Ekonomi Keluarga Miskin di Kabupaten Barito Utara (Tahun 2014-2017)".¹⁸ Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PKH di lokasi penelitian sudah dilakukan sesuai peraturan Kementrian Sosial RI, namun masih ada kekurangan dalam ketidaktepatan sasaran penerima manfaat akibat kurangnya koordinasi oleh pihak-pihak terkait. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti akan meninjau tentang efektivitas pelaksanaan PKH dari Distribusi Islam sedangkan pada penelitian terdahulu tidak.
4. Penelitian berjudul: "Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung".¹⁹ Hasil dari

¹⁸ Arba'atun Nisa, "Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mensejahterakan Ekonomi Keluarga Miskin di Kabupaten Barito Utara (Tahun 2014-2017)" (*Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palangkaraya*, 2018).

¹⁹ Cita Fauziatul Akmal, "Implementasi Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung" (*Skripsi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017).

penelitian yang dilakukan adalah implementasi PKH di Kranggan sudah efektif ditunjukkan melalui tiga tahapan yakni, tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi, ditunjukkan dengan kegiatan sosialisasi dilakukan dengan baik, lalu terdapat pembentukan anggota disetiap level pelaksana, dan pada tahap aplikasi ditunjukkan dengan validasi data yang dilakukan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus masalah tentang efektivitas pelaksanaan PKH dalam mensejahterakan rakyat miskin yang akan ditinjau dari distribusi Islam.

5. Penelitian dengan judul "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengurangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau).²⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas PKH di desa tersebut dikategorikan tidak baik ditunjukkan dengan kurang intensnya pertemuan pendamping dengan peserta, dan adanya pengurangan dana bantuan dengan dalih pengganti biaya transportasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya dua kategori yang menjadi fokus penelitiannya. Dari penelitian terdahulu di atas menjeaskan bahwa pelaksanaan PKH pada setiap wilayah memiliki imbas yang berbeda dengan daerah lain, begitupula dengan penelitian yang akan dilakukan

²⁰ Ridho Diana. "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Pengurangan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Desa Kota Jawa Kecamatan Way Khilau)" (*Skripsi* Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

dengan menelaah tentang efektivitas pelaksanaan PKH dalam mensejahterakan rakyat miskin yang ada di Desa Kepel Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk dengan ditinjau dari distribusi Islam.